

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara ataupun daerah. Pertumbuhan ekonomi akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu, karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan *output*, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat, Mankiw (2003).

Permasalahan pokok dalam pembangunan ekonomi adalah peningkatan Gross Domestic Product (GDP), pengurangan penghapusan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Di beberapa negara tujuan tersebut kadang-kadang menjadi sebuah dilema di antara mementingkan pertumbuhan ekonomi atau mengurangi kemiskinan (Deininger dan Olinto : 2000).

Menurut Samuelson dan Nordhaus (2001) ada empat faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yakni sumber daya manusia, sumber daya alam, pembentukan modal dan teknologi. Hal ini sejalan dengan teori

ekonomi neoklasik yang menitikberatkan pada modal dan tenaga kerja, serta perubahan teknologi sebagai sebuah unsur baru.

Tabel 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Provinsi, 2006 – 2011

(Persen)

Provinsi	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Aceh	1.56	(2.36)	(5.24)	(5.51)	2.79	5.02
Sumatera Utara	6.20	6.90	6.39	5.07	6.35	6.58
Sumatera Barat	6.14	6.34	6.88	4.28	5.93	6.22
Riau	5.15	3.41	5.65	2.97	4.18	5.01
Jambi	5.89	6.82	7.16	6.39	7.35	8.54
Sumatera Selatan	5.20	5.84	5.07	4.11	5.63	6.50
Bengkulu	5.95	6.46	5.75	5.62	6.06	6.40
LAMPUNG	4.98	5.94	5.35	5.26	5.85	6.39
Kepulauan Bangka Belitung	3.98	4.54	4.60	3.74	5.93	6.40
Kepulauan Riau	6.78	7.01	6.63	3.52	7.19	6.67
<i>Sumatera</i>	5.26	4.96	4.98	3.50	5.55	6.16
DKI Jakarta	5.95	6.44	6.23	5.02	6.50	6.71
Jawa Barat	6.02	6.48	6.21	4.19	6.20	6.48
Jawa Tengah	5.33	5.59	5.61	5.14	5.84	6.01
DI. Yogyakarta	3.70	4.31	5.03	4.43	4.88	5.16
Jawa Timur	5.80	6.11	5.94	5.01	6.68	7.22
Banten	5.57	6.04	5.77	4.71	6.08	6.43
<i>Jawa</i>	5.78	6.19	6.02	4.81	6.33	6.64
Bali	5.28	5.92	5.97	5.33	5.83	6.49
<i>Jawa & Bali</i>	5.77	6.18	6.02	4.82	6.32	6.64

Kalimantan Barat	5.23	6.02	5.45	4.80	5.37	5.94
Kalimantan Tengah	5.84	6.06	6.17	5.57	6.49	6.74
Kalimantan Selatan	4.98	6.01	6.45	5.29	5.58	6.12
Kalimantan Timur	2.85	1.84	4.90	2.28	5.04	3.93
<i>Kalimantan</i>	3.80	3.50	5.35	3.47	5.32	4.88
Sulawesi Utara	5.72	6.47	10.86	7.85	7.16	7.39
Sulawesi Tengah	7.82	7.99	7.78	7.71	8.75	9.16
Sulawesi Selatan	6.72	6.34	7.78	6.23	8.19	7.65
Sulawesi Tenggara	7.68	7.96	7.27	7.57	8.19	8.68
Gorontalo	7.30	7.51	7.76	7.54	7.63	7.68
Sulawesi Barat	6.90	7.43	12.07	6.03	11.91	10.41
<i>Sulawesi</i>	6.85	6.88	8.43	6.92	8.24	8.09
Nusa Tenggara Barat	2.77	4.91	2.82	12.14	6.33	(3.18)
Nusa Tenggara Timur	5.08	5.15	4.84	4.29	5.23	5.63
Maluku	5.55	5.62	4.23	5.44	6.47	6.02
Maluku Utara	5.48	6.01	5.99	6.07	7.95	6.41
Papua Barat	4.55	6.95	7.84	13.87	28.54	27.22
Papua	(17.14)	4.34	(1.40)	22.22	(3.16)	(5.67)
<i>Nusa Tenggara, Maluku & Papua</i>	(4.03)	5.06	2.55	13.32	5.36	2.51
Jumlah 33 Provinsi	5.19	5.67	5.74	4.77	6.13	6.32

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2011

Menurut Tabel 1, Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung, pada tahun 2006 nilainya masih di bawah rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (33 Provinsi) yaitu sebesar 4,98% dengan nilai rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia sebesar 5,19%. Pada tahun 2007, Laju Pertumbuhan

Ekonomi Provinsi Lampung nilainya sudah di atas rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yaitu sebesar 5,94% dengan nilai rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia sebesar 5,67%. Tetapi pada tahun 2008, Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung nilainya kembali di bawah rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yaitu sebesar 5,35% dengan nilai rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia sebesar 5,74%.

Kemudian pada tahun 2009, Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung nilainya kembali di atas rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yaitu sebesar 5,26% dengan nilai rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia sebesar 4,77%. Tetapi pada tahun 2010, Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung nilainya kembali di bawah rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yaitu sebesar 5,85% dengan nilai rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia sebesar 6,13%. Kemudian pada tahun 2011, Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung nilainya kembali di atas rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yaitu sebesar 6,39% dengan nilai rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia sebesar 6,32%.

Meningkat atau menurunnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung dikarenakan masih belum efektif dan meratanya alokasi pembangunan atau pertumbuhan pada setiap daerah.

Tabel 2. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi per Provinsi, 2006 - 2011 (Persen)

Provinsi	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Aceh	1.56	(2.36)	(5.24)	(5.51)	2.79	5.02
Sumatera Utara	6.20	6.90	6.39	5.07	6.35	6.58
Sumatera Barat	6.14	6.34	6.88	4.28	5.93	6.22
Riau	5.15	3.41	5.65	2.97	4.18	5.01
Jambi	5.89	6.82	7.16	6.39	7.35	8.54
Sumatera Selatan	5.20	5.84	5.07	4.11	5.63	6.50
Bengkulu	5.95	6.46	5.75	5.62	6.06	6.40
LAMPUNG	4.98	5.94	5.35	5.26	5.85	6.39
Kepulauan Bangka Belitung	3.98	4.54	4.60	3.74	5.93	6.40
Kepulauan Riau	6.78	7.01	6.63	3.52	7.19	6.67
Sumatera	5.26	4.96	4.98	3.50	5.55	6.16

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2011

Menurut Tabel 2, Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung pada tahun 2006 masuk ke dalam peringkat ke delapan dari sepuluh provinsi yang ada di Pulau Sumatera dengan angka Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,98%.

Pada tahun 2007, Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung naik 2 peringkat sehingga menduduki peringkat ke enam dari sepuluh provinsi yang ada di Pulau Sumatera dengan angka Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar

5,94%. Tetapi pada tahun 2008, Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi

Lampung turun 1 peringkat sehingga menduduki peringkat ke tujuh dari sepuluh provinsi yang ada di Pulau Sumatera dengan angka Laju Pertumbuhan

Ekonomi sebesar 5,35%. Kemudian pada tahun 2009, Laju Pertumbuhan

Ekonomi Provinsi Lampung naik 3 peringkat sehingga menduduki peringkat ke empat dari sepuluh provinsi yang ada di Pulau Sumatera dengan angka

Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,26%. Tetapi pada tahun 2010, Laju

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung turun 3 peringkat lagi sehingga

menduduki peringkat ke tujuh lagi dari sepuluh provinsi yang ada di Pulau Sumatera dengan angka Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,85%. Pada tahun 2011, Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung tetap menduduki peringkat ke tujuh lagi dari sepuluh provinsi yang ada di Pulau Sumatera dengan angka Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,39%.

Dilihat dari fakta tersebut, Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung tidak pernah menduduki peringkat tiga besar dari sepuluh provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung terunggul hanya mampu menduduki peringkat ke empat yang terjadi pada tahun 2009. Selebihnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung selalu menduduki peringkat di atas peringkat lima. Fakta ini menunjukkan bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung belum mampu mengungguli Laju Pertumbuhan Ekonomi beberapa provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Dengan demikian diperlukan usaha yang lebih baik lagi bagi Pemerintah Provinsi Lampung untuk dapat semakin meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dalam peringkat nasional.

Provinsi Lampung dengan luas wilayah 35.288,35 km² dan jumlah penduduknya mencapai 7.391.128 jiwa (Badan Pusat Statistik : 2010) merupakan bagian dari wilayah Indonesia yang terletak di ujung Selatan pulau Sumatera. Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat menunjukkan perubahan kinerja ekonomi wilayah. Dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi diharapkan produktifitas dan pendapatan masyarakat akan meningkat melalui penciptaan lapangan kerja dan

kesempatan kerja. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Periode 2002-2011

Tahun	Laju pertumbuhan (%)
2002	5,62
2003	5,07
2004	4,02
2005	4,93
2006	4,98
2007	5,94
2008	5,35
2009	5,26
2010	5,85
2011	6,39
Rata-Rata	5,34

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

Menurut Tabel 3, Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung dari tahun 2002-2011 berfluktuasi pada kisaran 5,62% sampai dengan 6,39%. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung terendah terjadi pada tahun 2004 sebesar 4,02% dan tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 6,39%. Walaupun laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada tahun 2011 nilainya sudah di atas rata-rata nilai laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung selama 10 tahun yaitu sebesar 6,39% dengan rata-rata nilai laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung selama 10 tahun sebesar 5,34%. Namun hal tersebut tidak cukup kuat untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung. Hal ini dikarenakan pada tahun 2003, 2004, 2005, 2006, dan 2009 laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung nilainya masih di bawah rata-

rata nilai laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung selama 10 tahun yaitu sebesar 5,07%, 4,02%, 4,93%, 4,98%, dan 5,26%.

Tabel 4.PDRB Provinsi Lampung Atas Dasar Harga Konstan 2002-2011

Tahun	PDRB Propinsi Lampung Atas Dasar Harga Konstan	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2002	25.433.275.000.000	5,62
2003	26.898.052.000.000	5,07
2004	28.262.289.000.000	4,02
2005	29.397.248.000.000	4,93
2006	30.861.360.000.000	4,98
2007	32.694.890.000.000	5,94
2008	34.443.152.000.000	5,35
2009	36.256.295.000.000	5,26
2010	38.378.425.000.000	5,85
2011	40.829.411.000.000	6,39

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2011

Menurut Tabel 4, PDRB Provinsi Lampung Atas Dasar Harga Konstan mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. PDRB Provinsi Lampung Atas Dasar Harga Konstan terendah terjadi pada tahun 2002 sebesar Rp. 25.433.275.000.000 dan tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar Rp. 40.829.411.000.000. Walaupun PDRB Provinsi Lampung Atas Dasar Harga Konstan memang memiliki kecendrungan meningkat. Namun peningkatan tersebut ternyata tidak cukup kuat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang dapat diukur dari PDRB. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada tahun 2006, 2008, dan 2010 nilainya masih di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dapat dilihat pada Tabel 1 dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung juga terunggul hanya mampu menduduki peringkat ke empat dari sepuluh provinsi

yang ada di Pulau Sumatera itupun hanya terjadi pada tahun 2009 yang dapat dilihat pada Tabel 2.

Mencermati fakta ini, langkah strategis diambil pemerintah daerah Provinsi Lampung dalam mengoptimalkan pencapaian pertumbuhan ekonomi dengan memberi kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Melalui kebijakan ini diharapkan terwujud pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara efektif dan efisien. Peran strategis pemerintah daerah Provinsi Lampung melalui pengeluaran konsumsi dan pengeluaran investasi diharapkan dapat efektif dan efisien dalam mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Konsumsi pemerintah pada penelitian ini di *proxy* menggunakan belanja aparatur daerah yang pada tahun 2006 berubah namanya menjadi belanja tidak langsung yang komponen-komponennya adalah belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja lain-lain, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan pengeluaran tidak terduga. Pengeluaran konsumsi Provinsi Lampung periode 2002-2011 dapat dilihat pada Tabel 5 dibawah ini.

Tabel 5. Pengeluaran Konsumsi Provinsi Lampung Periode 2002-2011

Tahun	Pengeluaran Konsumsi	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2002	147.975.681.000	5,62
2003	175.209.285.000	5,07
2004	206.501.927.000	4,02
2005	341.994.244.000	4,93
2006	744.321.160.000	4,98
2007	760.700.354.000	5,94
2008	1.062.018.773.000	5,35
2009	1.053.357.172.000	5,26
2010	968.441.248.000	5,85
2011	1.090.584.311.000	6,39

Sumber : Statistik Keuangan Daerah Propinsi Lampung, 2011

Menurut Tabel 5, pengeluaran konsumsi Provinsi Lampung terendah terjadi pada tahun 2002 sebesar Rp. 147.975.681.000 dan tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar Rp. 1.090.584.311.000.

Pos-pos terbesar dalam administrasi pemerintahan meliputi pengeluaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan untuk pegawai bagi kepala daerah beserta staf, anggota DPRD, dan rehabilitasi dan pembangunan gedung-gedung pemerintah. Pemerintah daerah mengharapkan dengan meningkatkan pengeluaran di bidang administrasi daerah akan meningkatkan produktifitas tenaga kerja pemerintahan daerah yang akan mendorong pengurangan kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan belanja pegawai diharapkan akan menyebabkan kenaikan produksi yang diukur dengan PDB dan PDRB serta kenaikan belanja barang dan jasa diharapkan memberikan dampak positif terhadap peningkatan produksi nasional dan provinsi. Peningkatan belanja barang dan jasa juga

akan mendorong penyerapan tenaga kerja di masing-masing sektor. Sektor industri pengolahan merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Dari segi wilayah, dampak dari kenaikan belanja barang dan jasa tersebut akan bervariasi pada setiap kabupaten dan kota di Provinsi Lampung, tergantung dari sektor manakah kabupaten atau kota tersebut yang lebih ditingkatkan.

Menurut Simon Kuznet, pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan kesanggupan negara tersebut menyediakan barang-barang yang terus dibutuhkan bagi rakyatnya. Kesanggupan ini didasari pada keberhasilan penguasaan teknologi dan birokrasi serta akselerasi pertumbuhan ekonominya dengan ideologi yang diantut.

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah, apabila pemerintah telah memerintahkan telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, biaya harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut, masyarakat mempunyai tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat memahami pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga masyarakat mempunyai tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak (Guritno, 2001).

Investasi pemerintah pada penelitian ini di *proxy* menggunakan belanja modal pemerintah daerah dalam APBD. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Tabel 6. Belanja Modal Provinsi Lampung Periode 2002-2011

Tahun	Belanja Modal Daerah	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2002	212.909.568.000	5,62
2003	228.041.807.000	5,07
2004	90.761.645.000	4,02
2005	174.393.394.000	4,93
2006	326.507.852.000	4,98
2007	269.809.535.000	5,94
2008	208.831.677.000	5,35
2009	233.290.049.000	5,26
2010	425.809.200.000	5,85
2011	499.168.983.000	6,39

Sumber : Statistik Keuangan Daerah Propinsi Lampung, 2011

Muana Nanga (2001) menyatakan bahwa akumulasi modal atau tambahan bersih terhadap stok kapital di definisikan sebagai investasi. Peningkatan investasi mendorong peningkatan kapasitas produksi yang diharapkan, selanjutnya meningkatkan produktivitas yang menghasilkan output dan nilai tambah, sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran

investasi Provinsi Lampung periode 2002-2011 dapat dilihat pada Tabel 6 di atas.

Menurut Tabel 6, Belanja Modal Daerah Provinsi Lampung terendah terjadi pada tahun 2004 sebesar Rp. 90.761.645.000 dan tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar Rp. 499.168.983.000.

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah pertumbuhan yang ditopang oleh investasi. Pertumbuhan yang ditopang oleh investasi dianggap akan dapat meningkatkan produktivitas sehingga membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Mankiw (2003) dalam teori pertumbuhan model Solow bahwa pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian, serta pengaruhnya terhadap output barang dan jasa suatu negara secara keseluruhan, apabila tingkat pertumbuhan perekonomian mencapai kondisi mapan, kemajuan teknologi perlu dimasukkan ke dalam model, yang meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memproduksi sepanjang waktu.

Kebijakan pemerintah yang berorientasi terhadap pertumbuhan pembangunan diharapkan akan memberikan dampak terhadap perubahan ekonomi menjadi lebih baik diberbagai sektor, karna pertumbuhan ekonomi akan mencerminkan adanya peningkatan dari perekonomian yang buruk kedalam perekonomian yang lebih baik dengan adanya peningkatan pendapatan perkapita maupun pendapatan dari sektor PDRB.

Dana pemerintah harus dapat diarahkan secara lebih baik. Sementara pendekatan pembangunan berbasis masyarakat akan memungkinkan

penanganan kerentanan dengan fokus yang luas, yang juga penting adalah mengarahkan pengeluaran pemerintah pada kelompok termiskin yang tertinggal dari sisi non-pendapatan, mengingat aspek multidimensi kemiskinan. Hanya melalui pengeluaran pemerintah yang lebih terarah dan efektif, maka pemerintah mampu mencapai kemajuan pada indikator-indikator pembangunan manusia. Secara spesifik, pemerintah perlu terus mencoba untuk mengarahkan upaya transfer kepada penduduk miskin. Hal ini dapat dilakukan melalui bantuan tunai bersyarat (BTB) yang ditujukan kepada layanan berkualitas pada bidang yang paling dibutuhkan.

Pengeluaran pemerintah juga bisa menjadi instrumen yang tepat untuk menyikapi ketimpangan antarwilayah dalam hal kemiskinan, baik dari dimensi pendapatan maupun non pendapatan. Perlu dibuat sistem transfer dari pusat ke daerah yang lebih berpihak kepada masyarakat miskin, serta membangun kemampuan dan menciptakan insentif bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan perhatian mereka terhadap pelaksanaan kebijakan yang berpihak kepada penduduk miskin.

Teori ekonomi menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat kemiskinan, yang menunjukkan semakin banyaknya output nasional yang menyebabkan kenaikan pendapatan perkapita, mengindikasikan semakin banyaknya tenaga kerja karena kenaikan jumlah penduduk sehingga seharusnya akan mengurangi kemiskinan dan pengangguran akan tetapi mengapa pertumbuhan ekonomi meningkat namun angka kemiskinan di Provinsi Lampung masih relatif tinggi.

Dari uraian diatas menarik untuk dibahas mengenai pertumbuhan ekonomi di Propinsi Lampung. Oleh karena itu penelitian ini berjudul **“Pengaruh Pengeluaran Konsumsi dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung”**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran konsumsi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung ?
2. Bagaimana pengaruh pengeluaran investasi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung?
3. Bagaimana pengaruh pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran konsumsi pemerintah secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran konsumsi pemerintah secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran konsumsi dan investai pemerintah secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung

D. Kerangka Pemikiran

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu kapasitas suatu perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa, yang diukur melalui peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam kerangka teori keynesian, berbagai jenis pengeluaran publik ini memberikan kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Tingkat pengeluaran pemerintah yang tinggi dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja dan meningkatkan jumlah investasi melalui angka pengganda (multiplier effect) permintaan agregat. Dengan demikian, Pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan output tergantung pada besarnya dan efektifitas angka pengganda pengeluaran.

Pengeluaran konsumsi pemerintah di gunakan untuk membiayai belanja pegawai, tunjangan, belanja barang seperti pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dalam penyelenggaraan pertahanan, kesehatan, pendidikan, biaya pemeliharaan, dan pengeluaran lain yang bersifat rutin.

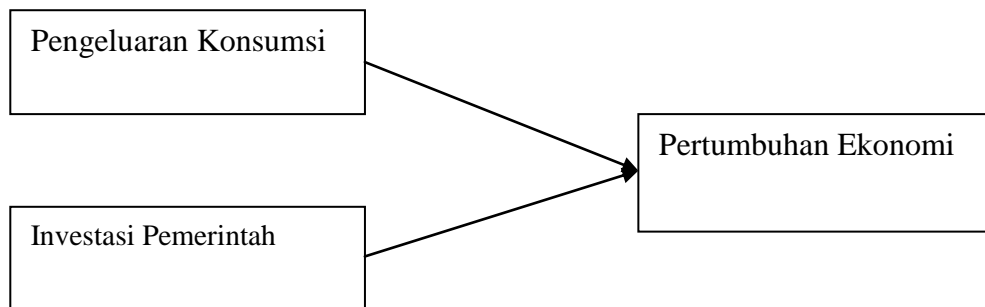
Selain itu Provinsi Lampung bila dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang cenderung mengalami peningkatan seharusnya bisa meningkatkan investasi dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Dimana pertumbuhan ekonomi meningkatkan pendapatan perkapita karena meningkatnya kesempatan kerja. Namun ironisnya pengeluaran konsumsi pemerintah yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang cenderung meningkat ternyata Provinsi Lampung merupakan provinsi termiskin ke-2 di Sumatera dan menduduki peringkat ke-8 Se Indonesia (Siswoyo,2007).

Pendapat WW Rostow dan RA Musgrave dalam buku Ekonomi Publik (Georino:1995) Menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal rasio investasi pemerintah terhadap pendapatan nasional relatif besar. Hal ini disebabkan karena pada tahap ini pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana. Pada tahap mencegah investasi pemerintah tetap di perlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan prasarana investasi swasta pada tahap ini sudah semakin besar.

Teori pertumbuhan Neoklasik melihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu segi penawaran. Teori ini pertumbuhan ekonomi tergantung pada pengembangan faktor-faktor produksi, yaitu penambahan modal marginal, serta perkembangan teknologi (Todaro, 1990).

Dengan melihat dari kajian pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung maka diperlukan kesinambungan antara pengeluaran konsumsi, investasi pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang bisa meningkatkan pendapatan perkapita akibat banyaknya angkatan kerja yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas, maka apat digambarkan skema penelitian :



Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran

E. Hipotesis

Berdasarkan pada uraian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Diduga pengeluaran konsumsi pemerintah behubungan positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.
2. Diduga pengeluaran investasi pemerintah behubungan positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.
3. Diduga bahwa pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.